



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN
DIREKTUR UTAMA PT. PLN (PERSERO)**

Tahun Sidang	: 2013 -2014
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Direktur Utama PT. PLN (Persero)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari,Tanggal	: Rabu, 25 September 2013
Pukul	: 14.00 s.d 18.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Ketua	: Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM
Sekretaris	: Dr. Dewi Barliana Soetisna, M.Psi
Hadir Anggota	: 35 dari 51 Anggota Komisi VII DPR-RI orang izin
Hadir Pemerintah	: Direktur Utama PT. PLN (Persero) beserta jajarannya.
Acara	: " Pelaksanaan Fungsi Pengawasan" Progress Pembangunan Pembangkit FTP 10.000 MW Tahap I.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Rabu, tanggal 25 September 2013 dibuka pukul 14.00 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. PLN (Persero) dengan pokok bahasan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, Membahas Progress Pembangunan Pembangkit FTP 10.000 MW Tahap I.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VII DPR RI meminta kepada Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk lebih aktif lagi untuk mendorong penyederhanaan birokrasi yang menjadi hambatan penyelesaian FTP 10.000 MW Tahap I diantaranya menyangkut pembebasan lahan, proses impor material dan proses perizinan di tingkat pusat maupun daerah.
2. Komisi VII DPR RI meminta kepada Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk menyampaikan laporan tertulis yang menyangkut kendala-kendala teknis operasional maupun keuangan secara periodik menyangkut Perkembangan FTP 10.000 MW Tahap I.

Ah 25/09-2013

3. Komisi VII DPR RI meminta kepada Direktur Utama PT. PLN (Persero), menyelesaikan krisis listrik segera, dengan berbagai upaya termasuk yang terakhir penyewaan genset yang sifatnya sementara di daerah yang mengalami krisis listrik seperti yang saat ini terjadi di wilayah Sumatera Utara, Riau, Lampung, Papua, Kalimantan Timur, NTB dan wilayah lainnya di Indonesia.
4. Komisi VII DPR RI meminta kepada Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk menyampaikan data mengenai sistem kontrak, dan jumlah genset (milik dan sewa), serta kapasitas genset yang saat ini beroperasi di seluruh Indonesia.
5. Komisi VII DPR RI meminta kepada Direktur Utama PT. PLN (Persero) agar listrik masuk desa merupakan prioritas yang harus segera diselesaikan dengan catatan bahwa desa yang bersangkutan sudah tersedia jalan yang asal-usul jalan tersebut dari masyarakat, negara (kehutanan, pertanian, perkebunan, dan yang lainnya), maupun perusahaan/swasta, contohnya daerah Parsoburan Kabupaten Tobasa, Kabupaten Gowa, Kabupaten Lampung Tengah dan Tulang Bawang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup 18.45 WIB

Jakarta, 25 September 2013

**PIMPINAN KOMISI VII DPR-RI
KETUA,**



DRS. IR. H. SUTAN BHATOEAGANA, MM